BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah berpdoman pada standar harga satuan reional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis lainnya.
- c. bahwa dengan adanya kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta mengakomodir kegiatan dan usulan perubahan standar harga satuan dari perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan tahun 2023 perlu diubah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar harga satuan.
 - (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. Satuan biaya pengadaan barang/jasa.
 - (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN TAHUN 2023

TAMBAHAN/SUPLEMEN

Tambahan merupakan acuan dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berfungsi secara optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Standar ini juga mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Tambahan, terdiri dari :

- A. Satuan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil Negara dan uang makan lembur bagi non aparatur sipil Negara;
- B. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang
- C. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah
- D. Honorarium Forkompimda
- E. Besaran *billing rate*/remunerasi
- F. Kegiatan bersumber Dana Transfer (selain APBD Kabupaten Batang)
- G. Daftar Harga Barang;
- H. Pengadaan Jasa
- I. Contoh Surat Usulan Perubahan/Penambahan SHS Barang/Jasa
- J. Contoh Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak
- K. Contoh Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- A. Satuan Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara

1. Uang makan lembur dihari kerja

Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara(ASN) /Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali.

2. Uang makan lembur di hari libur

Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara(ASN)/Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 5 (lima) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 2 (dua) kali.

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga	Ket
1	Uang makan lembur	Golongan IV	OH	41.000	
2	Uang makan lembur	Golongan III	OH	37.000	
3	Uang makan lembur	Golongan I dan II	OH	35.000	
4	Uang makan lembur	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pekerjaan Sejenisnya	OH	30.000	

Catatan:

Satuan pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak ketiga.

B. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
B	Standar Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Daerah				
1	<i>Honorarium Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</i>				
	- Penanggung Jawab		1.000.000	O/B	
	- Pengarah		800.000	O/B	
	- Ketua		700.000	O/B	
	- Wakil Ketua		600.000	O/B	
	- Sekretaris		500.000	O/B	
	- Anggota		400.000	O/B	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu s/d 200 Juta	150.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >200 juta s/d 400 Juta	175.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >400 juta s/d 1 M	200.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >1 M s/d 2.5 M	300.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >2.5 M s/d 5 M	400.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu > 5 M	500.000	O/K	
	- Honorarium Tim P3K		100.000	O/K	
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa(BLUD)		200.000	O/K	
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Non Pengadaan Barang/ Jasa		150.000	O/K	
2	<i>Yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>				
	- Pengarah		275.000	O/B	
	- Penanggungjawab		250.000	O/B	
	- Ketua		225.000	O/B	
	- Wakil Ketua		175.000	O/B	
	- Sekretaris		150.000	O/B	
	- Ketua Sub Komite/Koordinator		125.000	O/B	
	- Anggota/Anggota Sub komite/Asesor		100.000	O/B	
3	Honorarium Petugas CITO Operasi/Hemodialisa		150.000	Tim/ Operasi	
4	Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Muslim		750.000	O/B	
5	Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Non Muslim		500.000	O/B	
6	Honorarium Tenaga Pemulasaran Jenazah Wanita		750.000	O/B	
7	Honorarium Tenaga Dokter Residen		1.000.000	O/B	
8	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Diluar Daerah Batang dan Pekalongan)		UP	O/K	
9	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan dengan resiko dampak radiasi)		UP	O/K	
10	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan tanpa resiko dampak radiasi)		UP	O/K	
11	Memandikan jenazah kondisi utuh		100.000	O/B	
12	Memandikan jenazah kondisi rusak		150.000	O/B	
13	Tenaga pemakaman jenazah terlantar		750.000	O/B	
14	Tenaga pemulasaran jenazah khusus (HIV/AIDS)		200.000	O/B	

C. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah

- 1) Tingkat Pengguna Barang Rp. 200.000,00 - O/B
- 2) Tingkat Kuasa Pengguna Barang Rp. 150.000,00 - O/B

D. Honorarium Forkompimda

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - Pengarah Rp. 1.500.000,00 - O/B
 - Penanggungjawab Rp. 1.250.000,00 - O/B
 - Ketua Rp. 1.000.000,00 - O/B
 - Wakil Ketua Rp. 850.000,00 - O/B
 - Sekretaris/Anggota Rp. 750.000,00 - O/B
- 2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
 - Narasumber Rp. 1.400.000,00 - org/kegiatan
 - Narasumber Rp. 1.250.000,00 - org/kegiatan

E. Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2022

Besaran Remunerasi/BillingRate Minimal Tahun 2022 Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 Berdasarkan Pengalaman Profesional yang setara Kabupaten Batang untuk seleksi Jasa Konsultasi (diatas 100 Juta)

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	FENGALAMAN		RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH
			/BULAN	/BULAN	/BULAN
			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA		1	15.156.000	22.313.000	26.102.000
		2	16.419.000	23.786.500	27.786.000
AHLI MADYA	1	3	17.682.000	25.260.000	29.470.000
	2	4	18.945.000	26.733.500	31.154.000
	3	5	20.208.000	28.207.000	32.838.000
AHLI UTAMA	1	4	21.471.000	29.891.000	36.206.000
	2	5	22.734.000	31.364.500	37.890.000
	3	6	23.997.000	32.838.000	39.574.000
	4	7	25.260.000	34.322.000	41.258.000
	5	8	26.523.000	35.995.500	42.942.000
	6	9	27.786.000	37.469.000	44.626.000
	7	10	29.049.000	39.153.000	46.310.000
	8	11	30.312.000	40.626.500	47.994.000
	9	12	31.575.000	42.100.000	49.678.000
	10	13	32.838.000	43.784.000	51.362.000

	11	14	16	34.101.000	45.257.500	53.046.000
	12	15	17	35.364.000	46.731.000	54.730.000
	13	16	18	36.627.000	48.415.000	56.414.000
	14	17	19	37.890.000	49.888.500	58.098.000
	15	18	20	39.153.000	51.362.000	59.782.000
	16	19	21	40.416.000	53.046.000	61.466.000
	17	20	22	41.679.000	54.519.500	63.150.000
	18	21	23	42.942.000	55.993.000	64.834.000

Keterangan :

Keputusan Menteri PUPR Nomor: 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi.

DASAR : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TABEL 1. PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) KOMPONEN KEGIATAN	0	250	500	1000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	>
	sd 250	sd 500	sd 1000	sd 2.500	sd 5.000	sd 10.000	sd 25.000	sd 50.000	sd 100.000	sd 250.000	sd 500.000	500.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	18,11	16,6	13,71	11,31	9,75	8,54	7,32	5,85	4,08	2,68	1,94	1,8
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	10,59	8,43	7,09	5,94	5,94	4,95	4,26	3,83	3,05	2,03	1,54	1,49
3. PENGELOLA KEGIATAN (%)	14,00	12,00	8,37	5,47	3,52	2,37	1,55	1,00	0,67	0,45	0,30	0,25

TABEL 2. PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.) KOMPONEN KEGIATAN	0	250	500	1000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	>
	sd 250	sd 500	sd 1000	sd 2.500	sd 5.000	sd 10.000	sd 25.000	sd 50.000	sd 100.000	sd 250.000	sd 500.000	500.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	19,80	18,20	15,29	12,89	11,32	10,08	8,80	7,16	5,03	3,28	2,43	2,32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)	28,57	26,50	22,56	19,21	16,35	12,72	8,90	6,11	4,07	2,64	1,69	1,36
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	21,08	19,64	16,78	14,12	11,82	9,19	6,37	4,31	2,94	1,94	1,30	1,10
4. PENGELOLA KEGIATAN (%)	16,00	13,62	9,50	6,42	4,23	2,80	1,83	1,18	0,79	0,52	0,34	0,28

No.	Kelompok Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah per Bulan
1	CAD/CAM Operator	D3/S0 (5 - 10 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
2	Software Programmer/Implementer	D3/S0 (> 3 Tahun)	7,712,600.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
3	Hardware Technician	D3/S0 (> 3 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
4	Facilitator	D3/S0 (> 3 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 (> 6 Tahun)	8,420,900.00
		S1 (3 - 5 Tahun)	
		S2 (1 - 3 Tahun)	
6	Assistant Professional Staff	D3/S0 (3 - 6 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
7	Special Technician/Inspector	D3/S0 (> 3 Tahun)	6,453,400.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
8	Surveyor	D3/S0 (> 3 Tahun)	5,902,500.00
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	

No.	Kelompok Keahlian	Rupiah per Bulan
E.2.	Tenaga Pendukung	
1	Office Manager *)	6,689,500.00
2	Site Office Manager/Administrator	6,059,900.00

3	Bilingual Secretary	6,610,800.00
4	Secretary	4,092,400.00
5	Computer Operator/Typist	3,620,200.00
6	Drafter (Manual) **)	3,029,950.00
7	Messenger	2,164,250.00
8	Office Boy	1,967,500.00
9	Driver	2,321,650.00
10	Office Guard/Security Officer	2,124,900.00

Catatan :

- *) Digunakan untuk konsultan konstruksi / non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang
- ***) Disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan pendidikan sekolah kejuruan terkait.

F. Kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer

1. Sumber dana selain APBD;

- a) Kegiatan yang bersumber dari Dana transfer (sumber selain APBD Kabupaten Batang) dapat menggunakan juknis/peraturan perundangan yang berlaku;
- b) kegiatan bersumber dana transfer untuk ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang tetap menggunakan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun berkenaan;
- c) Standar harga kegiatan bersumber transfer untuk selain yang diperuntukkan ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengacu pada standar peraturan perundangan yang berlaku.

G. Daftar Harga Barang

Daftar harga barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Daftar harga barang adalah untuk jenis barang tidak terkecuali untuk kendaraan dinas apabila tidak terdapat dalam *E-Katalog*
2. Daftar harga barang adalah untuk kategori barang persediaan dan barang modal.
3. Barang Persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.
4. Barang modal adalah barang asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi :
 - a) Tanah merupakan barang asset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - b) Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
 - c) Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - e) Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi keadaan siap pakai;
 - f) Aset lainnya, mencakup asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.
5. Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.
6. Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam *e-katalog*, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-katalog*.
7. Dalam hal pengadaan barang belum tercantum dalam Standar Harga Satuan ini atau *e-katalog*, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
 - b) Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP/Harga pasar/hasil nilai appraisal independen);
 - c) Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
 - d) Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
 - e) Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
 - f) Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementrian/Lembaga terkait.

H. Pengadaan Jasa

Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan jasa yaitu Jasa Konsultasi, Jasa Pemeliharaan Aset dan Jasa Lainnya.

1. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi merupakan jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :

a) Jasa Konsultansi Konstruksi

Dalam jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud dengan :

- 1) Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 3) Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan disektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, yang terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli.
- 5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- 6) Billing Rate/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.

b) Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Dalam jasa konsultansi non konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, billing rate/remunerasi dan lain-lain dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hali ini biaya personil dan non personil).

2. Jasa Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Besaran yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Jasa Pemeliharaan Aset terdiri dari:

- 1). Jasa Pemeliharaan alat-alat kerja/kantor
- 2). Jasa Pemeliharaan alat-alat rumah tangga

3. Jasa Lainnya

Jasa Lainnya merupakan biaya jasa selain jasa konsultansi dan jasa pemeliharaan asset.

I. Penjelasan Tambahan

Komponen menjadi belanja modal dengan memperhatikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang, diatur sebagai berikut :

1. Komponen biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan asset :
 - a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (Handling Cost);
 - c) Biaya Pemasangan (Installation Cost);
 - d) Biaya Profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e) Biaya konstruksi : sepanjang tidak masuk dalam RAB kontrak;
 - f) Biaya pengujian asset untuk menguji apakah asset telah berfungsi dengan benar (Testing Cost);
 - g) Biaya kepanitiaan, diperuntukan bagi pengadaan tanah dengan spesifikasi khusus.
2. Komponen belanja yang tidak dibolehkan dianggarkan di Rekening Belanja Modal sebagai Administrasi Proyek (AP)
 - a) Honor KPA
 - b) Honor Pejabat/Panitia Pengadaan
 - c) Honor PPTK
 - d) Honor Tim Teknis
 - e) Belanja Makanan dan Minuman
 - f) Belanja Perjalanan Dinas
 - g) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - h) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
 - i) Belanja Sosialisasi
 - j) Belanja survey
 - k) Belanja Monitoring
 - l) Belanja PelaporanKesemuanya masuk rekening Belanja Barang/Jasa.
3. Belanja Pemeliharaan dengan pagu anggaran diatas Rp. 20.000.000,- yang akan mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kualitas dan volume masuk dalam rekening Belanja Modal.

J. CONTOH SURAT USULAN PERUBAHAN/ PENAMBAHAN SHS BARANG/ JASA

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor : Kepada:
Lampiran : Yth. Bupati Batang
Perihal : Usulan perubahan/penambahan Cq. Kepala BPKPAD
Kabupaten Batang
Standar Harga Satuan SKPD di
B A T A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20...., dengan ini kami mengajukan Permohonan usulan perubahan/penambahan (*) Standar Harga Satuan SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :

No	Kode Rekening	Nama/Jenis/Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga(termasuk Pajak)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Data tersebut berdasarkan survey harga secara professional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 3 (tiga) penyedia barang/jasa (**) sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standar Harga Satuan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(*) coret yang tidak perlu

(**) dilampirkan 3 (tiga) surat penyedia barang/jasa

Kepala
Selaku PA/KPA

Pangkat
NIP.

Tembusan: Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Arsip.

K. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(diisi dengan nama lengkap dan gelar)
NIP :(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Golongan/Pangkat:(diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Jabatan : Kepala(diisi dengan nama SKPD)
Kabupaten Batang
Selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Nomor ... tahun 20....
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 20.... pos anggaran (diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Batang, 20....

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP.

L. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

No	Kode Rekening	Nama/Jenis/Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk Pajak)	Ket. (Dasar Pengambilan Harga)	%TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI